

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, negara menjadi aktor utama yang pada dasarnya berupaya untuk membangun berbagai bentuk hubungan dengan aktor lain, baik bilateral, regional maupun unilateral untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh karena itu, interaksi yang dibangun kerap sekali mencerminkan kepentingan strategis masing-masing negara, seperti memperoleh dukungan, keamanan, memperluas pengaruh, dan lainnya (Binus University, n.d.). Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memanfaatkan *Foreign policy* (kebijakan luar negeri) sebagai salah satu instrumen utama dalam interaksi internasional. Selain itu, negara yang memiliki kapasitas, seperti sumber daya, posisi strategis, dan keterampilan diplomatik memiliki peluang yang lebih besar dalam mempertahankan kepentingnya, serta mempengaruhi aktor lain, baik dari perilaku maupun hubungan (Bowie & Thaywick, 2026).

Sebagai salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam tatanan global, Amerika Serikat (AS) secara konsisten memanfaatkan kebijakan luar negeri dalam mendukung tercapainya kepentingan nasional. Hal tersebut tercermin dari penggunaan berbagai instrumen, seperti keamanan, ekonomi, dan politik, khususnya bantuan luar negeri. Kemudian, dalam praktiknya, bantuan luar negeri tidak hanya berfungsi sebagai simbol kemanusiaan dan komitmen terhadap mitra (sekutu), tetapi juga untuk mempertahankan kepentingan strategis (Braunwarth, 2026). Dengan demikian, bantuan luar negeri AS juga memiliki peran sebagai

instrumen dalam membentuk dan mengontrol perilaku aktor lain sesuai kepentingan nasionalnya.

Lebih lanjut, dalam sistem penyaluran bantuan luar negeri AS, presiden memiliki posisi yang cukup sentral dalam menentukan arah kebijakan, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam hal ini, penyaluran bantuan dilaksanakan melalui mekanisme *check and balances*, dimana prosesnya tidak dapat lepas dari keterlibatan lembaga legislatif (kongres) serta aktor non-pemerintah, seperti media, kelompok kepentingan dan opini publik. Mekanisme tersebut dilaksanakan sebagai upaya meminimalkan terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau lembaga. Selain itu, bantuan yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari aktor lain, terutama kongres, tidak dapat diberhentikan atau ditunda secara sepihak oleh lembaga eksekutif (Farivar, 2024). Dengan demikian, keberlanjutan dan arah penyaluran bantuan luar negeri merupakan bentuk interaksi antara eksekutif, legislatif (kongres), dan dinamika domestik.

Ukraina merupakan salah satu mitra strategis AS dalam mendukung tercapainya kepentingan kebijakan luar negeri, terutama pada wilayah Eropa Timur. Dalam hal ini, hubungan bilateral antara Ukraina dan AS sudah terjalin sejak tahun 1991, tepatnya setelah kemerdekaan Ukraina dan telah mencapai tahanan yang cukup formal pada tahun 2008, melalui kesepakatan U.S-Ukraine Charter on Strategic Partnership (Piagam Kemitraan Strategis AS-Ukraina). Piagam tersebut memuat komitmen kerja sama kedua negara pada bidang pertahanan, perdagangan, energi dan budaya, serta demokrasi. Selain itu, AS juga menunjukkan komitmennya melalui

dukungan terhadap perkembangan kerja sama antara Ukraina dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Pashkov, 2025).

Hubungan AS dan Ukraina semakin kompleks seiring dengan meningkatnya dinamika keamanan di wilayah Eropa Timur, terutama serangan invasi Rusia pada beberapa wilayah Ukraina. Serangan tersebut bermula sejak aneksasi Krimea pada tahun 2014, kemudian dilanjutkan pada konflik Laut Azov tahun 2018, hingga invasi pada beberapa wilayah di tahun 2022, mencakup Donetsk, Luhansk, Mariupol, dan Kherson. Dampak yang disebabkan tidak hanya merugikan kedua negara yang berkonflik, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan di wilayah Eropa Timur. Dampak tersebut, yang kemudian menempatkan Ukraina sebagai mitra strategis AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah Eropa Timur, khususnya pada upaya membendung pengaruh Rusia, dan mempertahankan stabilitas dan keamanan di wilayah negara sekutu. Serta, posisi strategis tersebut yang mendorong AS untuk terlibat secara aktif dalam mendukung Ukraina, seperti penyaluran bantuan luar negeri selama konflik berlangsung (maulidina & Saputra, 2023).

Pada tahun 2014, tepatnya awal terjadinya serangan Rusia, di bawah kepemimpinan Barack Obama, pemerintah AS memilih pendekatan yang cenderung terbatas dan berhati-hati pada kebijakan luar negerinya, sebagai upaya meminimalkan resiko eskalasi konflik. Melansir dari *Fact Sheet* yang dipublikasikan oleh the White House (2016), pemerintahan Obama mengalokasikan dana bantuan luar negeri sebanyak US\$1,3, dengan tujuan untuk mendukung terlaksanya reformasi, pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat upaya demokrasi,

keamanan Ukraina, dan perlindungan masyarakat sipil (the White House, 2016). Kemudian, pada tahun 2015, pemerintah AS mengumumkan bahwa intervensi secara tidak langsung akan dilakukan sebagai respon keberlanjutan konflik. Dalam konteks intervensi, melalui upaya memimpin aliansi NATO, AS berupaya untuk menyalurkan dan memperkuat kemampuan komando, komputer militer, komunikasi, serta meningkatkan standarisasi dan kapasitas pertahanan Ukraina (Pace, 2015). Selain itu, selama kepemimpinannya, Obama menolak dengan tegas penyaluran *lethal aid* (bantuan mematikan), seperti rudal anti-tank Javelin, karena dinilai berpotensi memicu eskalasi militer yang lebih luas, terutama bagi pendukung Rusia di Moskow (Sink, 2015).

Kemudian, memasuki masa kepemimpinan Donald Trump pada tahun 2017, kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina mengalami dinamika yang signifikan. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, pada Desember 2017, Trump menyetujui bahkan membentuk rencana penjualan senjata *lethal weapons* kepada Ukraina, yang ditolak dengan tegas oleh Obama (Sherman, 2024). Selain itu, pada pemerintahnya, Trump memperkenalkan ideologi *America First* sebagai salah satu landasan terlaksananya kebijakan luar negeri. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut akan memperoritakan kepentingan nasional dan mendorong evaluasi terhadap komitmen internasional yang sebelumnya sudah dijalankan apakah menguntungkan atau justru merugikan AS (Mateo, 2024). Di sisi lain, Trump menyalurkan bantuan ratusan dollar melalui *Foreign Military Financing* (FMF) dan *Ukraine Security Assistance Initiative* (USAI).

Lebih lanjut, melansir dari Ukraine Business News (2025), bantuan yang disalurkan AS mengalami peningkatan dari US\$524,3 juta pada tahun 2017 menjadi US\$706,5 juta tahun 2020. Bantuan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2019 sebagai bentuk dukungan pemerintah AS terhadap Ukraina. Namun, pada periode yang sama, tepatnya Juli 2019, terjadi penundaan sementara pada penyaluran bantuan kepada Ukraina sekitar US\$400 juta, selama 55 hari oleh Office of Management (OMB) (Ukraine Business News (UBN), 2025). Berdasarkan kesaksian yang muncul selama penyelidikan yang dilakukan Government Accountability Office (GAO), ditemukan bahwa penundaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Donald Trump (Smith, 2019). Selain ditemukannya bahwa penundaan bantuan terhadap Ukraina merupakan arahan langsung dari presiden, peristiwa tersebut semakin menarik perhatian dengan bocornya panggilan telepon antara Trump dan Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina (Fandos, 2021).

Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan, GAO menetapkan Trump telah melanggar undang-undang *Impoundment Control Act* dengan menunda penyaluran bantuan yang sudah disetujui oleh kongres tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku (Smith, 2019). Pada akhirnya bantuan kembali disalurkan pada September 2019, dimana hal tersebut telah memicu terjadinya ketidakpastian dalam hubungan bilateral kedua negara. Penundaan juga berdampak pada krisis politik dan memicu tuntutan proses pemakzulan dari kongres terhadap Trump (Yousif, 2020). Dengan demikian, meskipun penyaluran bantuan pada masa kepemimpinan Trump secara umum relatif berlanjut, tetapi terdapat beberapa arah kebijakan bantuan luar negeri

yang mengalami pergeseran dari pemimpin sebelumnya serta ketidaksejajaran antara Trump dengan kongres.

Pada masa kepemimpinan Joe Biden dari tahun 2021 hingga 2025, hubungan dan kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina kembali menunjukkan peningkatan, terutama dalam merespon eskalasi konflik pada Februari 2022. Dalam hal ini, AS menempatkan posisinya sebagai pihak utama yang mendukung Ukraina, yang tercermin dari penyaluran bantuan keamanan sebanyak US\$66,5 miliar (Mills, 2025). Bantuan tersebut mencakup sistem pertahanan udara, teknologi perang modern, pelatihan militer, persenjataan, serta drone. Selain itu, atas persetujuan Biden, pemerintah AS menyalurkan bantuan melalui beberapa mekanisme, seperti *Presidential Drawdown Authority*/PDA (kewenangan presiden), *Foreign Military Financing*/FMF (pendanaan pemerintah AS), serta *Ukraine Security Assistance Initiative*/USAI (pendanaan AS terhadap Ukraina). Upaya tersebut dilaksanakan sebagai dukungan pengadaan kapasitas pertahanan jangka panjang terhadap Ukraina.

Selain dukungan dari eksekutif (presiden), dibawah kepemimpinan Biden, penyaluran bantuan juga mendapatkan dukungan dari legislatif AS. Hal tersebut, tercermin dari lolosnya alokasi bantuan sebanyak US\$40 miliar pada tahun 2022, melalui pemungutan suara dengan jumlah 86 berbanding 11. Selain itu, pada tahun 2024, kongres menyetujui RUU penyaluran dana sebanyak US\$95 miliar dengan dukungan suara sebanyak 201 dari anggota Partai Demokrat dan 101 dari Partai Republik (Saenz, 2024). Di sisi lain, dukungan terhadap penyaluran bantuan juga mendapatkan dukungan dari publik AS, dimana dengan mengutip dari laporan

Younis (2023) terkait hasil survei Gallup pada Januari 2023, data menunjukkan bahwa sebanyak 65% masyarakat secara tetap memberikan dukungan terhadap Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya, meskipun akan berdampak pada konflik yang berkepanjangan (Younis, 2023). Dengan demikian, pola pada periode Biden menunjukkan bahwa keberlanjutan penyaluran bantuan terhadap Ukraina berjalan dengan keterlibatan dukungan antara eksekutif, kongres, serta publik AS yang selaras.

Kemudian, arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina kembali mengalami dinamika dengan seiring kembalinya Trump pada kursi presiden pada awal tahun 2025. Sejak awal kepemimpinannya, Trump tidak lagi mengajukan mandat baru kepada kongres terkait penyaluran bantuan militer. Selain itu, sebagian besar dana bantuan militer yang telah direncanakan dan dialokasikan pada kepemimpinan Biden belum disalurkan kembali kepada Ukraina, yakni sebanyak US\$29 miliar. Ketegangan semakin meningkat setelah pertemuan antara Presiden Zelensky dan Trump di Gedung Putih pada 28 Februari 2025. Setelah ketegangan antara kedua pemimpin negara tersebut, tepatnya pada 3 Maret 2025, seorang pejabat Gedung Putih menyampaikan bahwa penyaluran bantuan militer terhadap Ukraina akan diberhentikan sementara seiring dengan upaya evaluasi terhadap penyelesaian konflik (CNBC, 2025).

Lebih lanjut, penghentian sementara penyaluran bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina pada awal kepemimpinan kedua Trump menunjukkan ketidaksejajaran dengan kecenderungan dukungan dari kongres dan domestik yang relatif masih ada. Salah satunya tercermin dalam hasil survei University of

Maryland Critica Issues Poll yang dilakukan pada tahun 2025 dan dipublikasikan oleh Brookings Institution (2025), dimana sebanyak 59% masyarakat AS menyatakan sikap mendukung, serta, dalam laporan yang sama, tercatat bahwa hanya 35% masyarakat yang mendukung kebijakan Trump tersebut, sedangkan 48% menunjukkan penolakan terhadap kebijakan penghentian sementara penyaluran bantuan (Telhami, 2025). Kebijakan penghentian sementara juga mendapatkan kritikan dari anggota kongres, Joe Courtney, yang menilai bahwa langkah tersebut bertentangan dengan tujuan legislatif yang telah disahkan melalui pemungutan suara pada masa kepemimpinan sebelumnya, yakni Joe Biden (Congressman Joe Courtney, 2025). Selain itu, dukungan juga tercermin pada Februari 2025, dimana anggota Senior Shaheen dan Senator Tillis memimpin resolusi bipartisan dalam mendukung kedaulatan Ukraina dan mengutuk tindakan Rusia (Foreign Relation Committee, 2025). Dengan demikian, perbedaan pandangan antara eksekutif, legislatif, dan publik AS mencerminkan ketidaksejajaran terkait penyaluran bantuan, dimana hal tersebut memunculkan kondisi yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Fenomena ketidaksejajaran arah kebijakan bantuan luar negeri terhadap Ukraina membentuk suatu pola yang cukup tidak lazim dalam sistem kebijakan bantuan luar negeri AS dan menjadi titik awal penelitian ini. Dalam hal ini, pola tersebut memunculkan pertanyaan mengenai faktor yang dapat menjelaskan pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinan Trump. Namun, penelitian ini tidak menutup kemungkinan faktor lain dapat turut berperan dalam mempengaruhi pergeseran arah kebijakan luar

negeri, seperti dinamika partai, kondisi geopolitik internasional, perkembangan konflik Rusia-Ukraina, hingga faktor yang berkaitan dengan aktor pengambil keputusan Trump. Dengan demikian, diperlukan kajian yang sistematis untuk menemukan faktor yang berperan pada pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina tanpa terlebih dahulu menempatkan salah satu faktor sebagai penjelasan tunggal.

Selain ketidaksejajaran keputusan Trump dengan Legislatif dan publik AS, penulis juga memandang bahwa perubahan arah kebijakan ini penting untuk dikaji karena tidak hanya mempengaruhi kemampuan pertahanan Ukraina, tetapi juga menurunkan angka kredibilitas komitmen AS sebagai mitra strategis pada sistem internasional. Selain itu, fenomena ini menjadi gambaran bahwa arah kebijakan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh dukungan domestik semata, sehingga memberikan ruang untuk melakukan kajian terhadap faktor lain yang mempengaruhi proses pemutusan kebijakan pada tingkat eksekutif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah “mengapa terjadi pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap Ukraina selama kepemimpinan Donald Trump?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina, mulai dari posisi strategis Ukraina pada kebijakan luar negeri AS, hingga perkembangan kebijakan bantuan luar negeri, terutama sejak konflik berlangsung, seperti Barack Obama, Donald Trump 1.0, Joe Biden, Donald Trump 2.0. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait sistem kebijakan luar negeri AS serta menunjukkan data dukungan yang tercermin dari domestik (opini publik) dan institusional (kongres). Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perjalanan hidup Trump yang kemudian membentuk cara pandanganya terhadap kebijakan luar negeri.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yakni menganalisis bagaimana cara pandang dan pola pengambilan keputusan Donald Trump sebagai seorang pemimpin dalam mendorong arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina. Serta menganalisis implikasi dari cara pandang dan pola keputusan tersebut terhadap pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinanya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan Studi Hubungan Internasional terkait faktor-faktor yang memiliki peran pada pergeseran arah kebijakan luar negeri, terutama pada level pemimpin (individu). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian yang berfokus pada level individu, dimana penelitian tidak hanya berfokus pada faktor struktur internasional serta pengaruh domestik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara holistik terhadap para pengambil kebijakan serta analisis politik terkait mengapa suatu kebijakan luar negeri pada setiap masa kepemimpinan dapat berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan pendekatan komunikasi dan kerja sama internasional yang lebih adaptif dan efektif terhadap perbedaan pandangan pada setiap kepemimpinan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikelompokkan dengan menyesuaikan fokus masing-masing serta akan disusun secara bertahap sebagai upaya membangun justifikasi terhadap relevansi dan kebaharuan penelitian ini. Susunan penelitian akan dimulai dari kelompok pertama yang menunjukkan pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinan Donald Trump. Kelompok selanjutnya, akan

memperlihatkan faktor yang berkontribusi pada pergeseran kebijakan tersebut, seperti aspek partai, perkembangan konflik, serta geopolitik. Selanjutnya, kelompok ketiga akan menunjukkan bagaimana dalam sistem kebijakan luar negeri, seorang pemimpin dapat berkontribusi terhadap putusan kebijakan luar negeri negara tersebut. Pada bagian terakhir, akan memperlihatkan bahwa kerangka LTA milik Margaret G. Hermann telah diterapkan pada Trump di beberapa kasus, sehingga analisis terhadap Trump cukup relevan, tetapi tidak ditemukan penelitian yang berfokus pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS kepada Ukraina.

Dalam kelompok pertama, terdapat penelitian milik Luiza Rodrogués Mateo (2024) dengan judul "*America First: Foreign Aid and the Trump Administration*", yang mengkaji perubahan orientasi kebijakan bantuan luar negeri AS pada masa kepemimpinan Donald Trump melalui pendekatan *America First*. Penelitian tersebut menemukan bahwa pada masa kepemimpinan Trump cara pandang terhadap bantuan luar negeri bergeser yang sebelumnya sebagai instrumen kepentingan global menjadi kepentingan nasional. Pergeseran tersebut tercermin dari pemotongan anggaran bantuan luar negeri, penekanan ideologi *self-reliance*, dan pemanfaatan bantuan sebagai instrumen bersaing, tetapi dalam implementasinya pergeseran ini tidak sepenuhnya berhasil karena penolakan dari kongres (Mateo, 2024). Selanjutnya penelitian milik Vyas (2025) yang menganalisis bagaimana arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina di bawah kepemimpinan Trump menunjukkan perubahan dari yang berbasis nilai menjadi suatu pendekatan transaksional (mementingkan keuntungan timbal balik dan kepentingan jangka pendek). Di sisi lain, Vyas juga menekankan bahwa Trump

cenderung memandang hubungan luar negeri sebagai suatu negosiasi bisnis, dimana bantuan militer yang disalurkan kemudian dikaitkan dengan kepentingan domestik, seperti penundaan bantuan pada tahun 2019 (Vyas, 2025).

Selanjutnya, kelompok kedua yang mencakup penelitian milik Jordan Tama (2025) yang berjudul "*Bipartianship Put to the Test: U.S Policy Toward Ukraine, Israel, and Taiwan*", berfokus pada pemetaan pola konsesus bipartisan terkait kebijakan bantuan luar negeri AS pasca pemilu tahun 2024. Dalam penelitiannya, Tama berhasil menemukan bahwa dalam dinamika pergeseran tersebut terdapat perpecahan inter-partai, ketidaksepakatan antar partai, dan kerja sama lintas partai. Sehingga Tama berpendapat bahwa pergeseran tidak sepenuhnya merupakan cerminan dari polarisasi antar partai, melainkan ada faktor lain yang menjadi faktornya. Selain itu, Tama juga menunjukkan bahwa Trump berupaya untuk mengontruksikan bantuan tersebut sebagai suatu isu kepentingan antara partai, akan tetapi paket legalisis yang menjadi rujukannya justru lolos melalui kongres dan mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota Partai Republik (Tama, 2025).

Penelitian Tama berkontribusi menunjukkan bahwa faktor partai pada dasarnya memiliki peran penting dalam dinamika pergeseran tersebut. Namun, penelitian Tama juga menunjukkan bahwa internal partai republik sendiri tidak bergerak sebagai satu kesatuan yang kuat, dimana hal tersebut menjelaskan bahwa kajian melalui aspek partai tidak cukup tuntas dalam menjawab rumusan masalah bahkan internal partai sendiri mengalami perpecahan. Kemudian, penelitian selanjutnya milik Ruth Deyermond (2023) dengan judul "*The Trump Presidency, Russia and Ukraine: Explaining Incoherence*", yang menganalisis terkait

inkonsistensi pada kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina dan Rusia selama kepemimpinan Trump. Dalam penelitiannya, Deyermund menyebutkan bahwa walaupun secara formal kebijakan bantuan terhadap Ukraina cenderung berpola meneruskan pendekatan pemimpin sebelumnya, seperti pemberian sanksi dan pengakuan kedaulatan negara tersebut. Namun, sikap pribadi Trump kerap sekali bertentangan dengan kebijakan resmi institusional negaranya. Deyermund, secara tegas menyampaikan bahwa yang menjadi pendorong ketidaksejalan tersebut bersumber langsung dari Trump sendiri, terutama ia tidak memiliki pengalaman pada pembentukan kebijakan luar negeri sebelum menjabat sebagai presiden (Deyermund, 2023).

Lebih lanjut, dalam penelitiannya, Deyermund juga menyimpulkan bahwa inkoherensi ini memberikan batasan terhadap *Foreign Policy Analysis* (analisis kebijakan luar negeri) dalam mengkaji penyebab pergeseran kebijakan luar negeri Trump melalui pendekatan konvensional. Pendekatan tersebut, seperti analisis melalui pendekatan birokrasi, institusional, serta dinamika partai. Dengan demikian, penelitian tersebut tidak hanya dapat memperkuat ketidaktuntasan penjelasan institusional dan dinamika partai yang sebelumnya ditunjukkan oleh Tama. Tapi juga memberikan ruang baru untuk pendekatan yang dapat menjelaskan mengapa pergeseran kebijakan terjadi, salah satunya kajian pada level individu pemimpin tersebut.

Selanjutnya, kelompok ketiga terdiri dari penelitian Thiers dan Wehner (2022) yang berjudul “*The Personality of Populist Leaders and Their Foreign Policies: Hugo Chávez and Donald Trump*”. Penelitian ini menggunakan kerangka

LTA milik Hermann sebagai landasan konseptual untuk mengidentifikasi kecenderungan Trump melalui pernyataan dan tindakan publiknya pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun, Penelitian ini membahas kebijakan luar negeri Trump secara umum, sehingga tidak berfokus pada satu isu atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat tertentu. Kedua penulis menerapkan kerangka LTA secara kualitatif, dimana analisis hanya dilakukan dari cenderung Trump berdasarkan pernyataannya tanpa membutuhkan instrumen psikologi klinis maupun metode *coding* kuantitatif yang membutuhkan sertifikasi khusus. Di sisi lain, penelitian ini menegaskan bahwa kebutuhan kajian lebih spesifik terhadap pemimpin populis pada kasus tertentu cukup penting untuk dilakukan (Thiers & Wehner, 2022).

Hasil penelitian milik Thiers dan Wehner (2022) sejalan dengan hasil penelitian milik Brummer dan Fouquet (2022) dengan judul “*Profiling the Personality of Populist Foreign Policy Makers: A Leadership Trait Analysis*”. Penelitian tersebut memperluas kajian yang menerapkan kerangka LTA pada delapan pemimpin populis di wilayah Asia, Eropa, serta AS, salah satunya Trump. Namun, kedua penelitian ini terbatas dalam ruang lingkup kebijakan secara umum (fouquet & Brummer, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan analisis secara spesifik pada satu isu, yakni penelitian milik Destiana et al (2024) “Idiosinkratik Donald Trump dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Krisis Kemanusiaan Di Venezuela Tahun 2017-2021”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan idiosinkratik milik Margaret G. Hermann serta menunjukan bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap Venezuela cenderung dipengaruhi oleh indikator *interpersonal style* dan *motives*. Namun, objek penelitian Destiana et al masih

terbatas pada pola kebijakan luar negeri AS terhadap isu imigran di Venezuela, sehingga dibutuhkan penelitian baru yang mengkaji pergeseran kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina (Destiana et al., 2024).

Berdasarkan pemaparan kedelapan penelitian terdahulu, relevansi dan kebaharuan penelitian ini dapat diidentifikasi secara bertahap. Kelompok pertama, penelitian milik Mateo dan Vyas menunjukkan pergeseran kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina yang terjadi pada masa Trump. Kedua penelitian tersebut tidak menunjukkan bahwa pergeseran yang terjadi didorong oleh faktor tertentu, apakah karena situasi internal atau justru eksternal, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa terjadi pergeseran pada kebijakan bantuan luar negeri tersebut.

Kemudian, kelompok kedua yang terdiri dari penelitian milik Tama, dan Deyermond berhasil menunjukkan bahwa pergeseran yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dinamika partai, hingga institusional. Namun, kedua penelitian tersebut belum dapat memberikan analisis secara tuntas terkait pergeseran yang terjadi serta mengapa Trump mengeluarkan keputusan eksekutif. Sementara, situasi domestik menunjukkan bahwa dukungan kongres dan publik relatif ada, internal partai republik terbelah, serta ketidakselaraan antara putusan Trump dengan institusional AS. Lebih lanjut, penelitian milik Deyermond menegaskan bahwa pendekatan institusional tidak cukup untuk menganalisis faktor pergeseran kebijakan tersebut, serta ketidaksejajaran antara institusional dan putusan Trump merupakan bentuk dari karakteristik pribadi dirinya. Hal tersebut, yang kemudian menunjukkan bahwa faktor institusional serta dinamika partai belum

sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa pergeseran kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina, sehingga dibutuhkan analisis pada level yang berbeda.

Pada kelompok ketiga, yang mencakup penelitian milik Thiers dan wehner (2022) serta Brummer dan fouquet (2022) menunjukkan bahwa karakteristik Trump memiliki peran cukup penting terhadap keputusan kebijakan luar negeri AS. Namun, kedua penelitian tersebut menganalisis karakteristik Trump pada ruang lingkup kebijakan luar negeri secara umum atau tidak berfokus pada satu isu spesifik. Sedangkan penelitian milik Destiana et al (2024) menganalisis karakteristik Trump tetapi pada kasus imigrasi di Venezuela, sehingga fokus penelitian tersebut berada pada ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian ini. Dalam istilah lain, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah belum adanya kajian yang menerapkan analisis kerangka LTA milik Hermanna pada pergeseran kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinan Trump.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan terkait mengapa terjadi pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinan Trump. Upaya tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor lain yang berpotensi mempengaruhi pergeseran, seperti perkembangan konflik Rusia-Ukraina, dinamika partai, dan dorongan kongres (sistem kebijakan luar negeri AS). Oleh karena itu, untuk mempertahankan pemahaman secara komperhensif terkait mengapa pergeseran tersebut terjadi, penting untuk melengkapi keterbatasan pada penelitian terdahulu dengan

menganalisis pada level yang berbeda, yakni analisis aktor (karakteristik) dengan menggunakan kerangka LTA milik Hermann.

1.5.2 Pendekatan Idiosinkratik

Foreign Policy Analysis/FPA (Analisis Kebijakan Luar Negeri) merupakan salah satu cabang kajian dalam Studi Hubungan Internasional yang berfokus pada proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara serta aktor-aktor yang terlibat selama proses tersebut. Dalam hal ini, FPA tidak hanya melihat suatu kebijakan luar negeri dari kondisi internasional, tetapi juga memperhatikan aspek siapa yang membuat keputusan tersebut, bagaimana keputusan dapat dibentuk, serta faktor apa saja yang terlibat dalam keputusan. Oleh karena itu, analisis FPA dapat mencapai level berbagai aktor yang memiliki keterlibatan dalam pembentukan kebijakan luar negeri, baik secara institusional maupun non-institusional. Di sisi lain, FPA muncul sebagai respon atas keterbatasan pendekatan yang cenderung menekankan sistem internasional dalam menjelaskan kebijakan luar negeri, sedangkan peran dari dinamika internal negara, seperti birokrasi, individu, serta faktor domestik lainnya cenderung diabaikan (Alden & Aran, 2012).

Penekanan terhadap *agency* merupakan salah satu karakter utama dalam analisis FPA, dimana aktor dan proses pembentukan dipandang memiliki kontribusi dalam memahami putusan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, FPA tidak melihat negara hanya sebagai entitas abstrak, melainkan sebagai suatu kelompok atau individu yang memiliki kepentingan, prefensi, hingga pandangan yang berbeda. Kemudian, FPA mengalami perkembangan yang tercermin dari terbukannya berbagai pendekatan yang dalam, seperti dari aspek birokrasi

(persaingan antara lembaga), domestik (pengaruh struktural internal negara), hingga *behaviorism* atau perilaku (menyoroti peran kepribadian individu) (Thiers & Wehner, 2022). Salah satunya adalah pendekatan *behavioralisme* (perilaku) yang berkembang sejak dekade 1950 dan 1960.

Lebih lanjut, dalam FPA, pendekatan perilaku berusaha untuk memahami proses pengambilan kebijakan luar negeri dengan menempatkan pengalaman pribadi, faktor psikologi, serta keterbatasan informasi dari pemimpin sebagai variabel penjelas. Dengan demikian, pendekatan perilaku memandang bahwa kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh bagaimana aktor dalam memahami suatu isu internasional (Alden & Aran, 2012). Dalam konteks penelitian ini, dalam memahami pergeseran kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinan Donald Trump, penulis menggunakan level analisis individu, yakni Idiosinkratik yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann (1980). Istilah idiosinkratik sendiri merupakan penggabungan dari dua kata, yakni ideologi dan sinkratik yang diadopsi dari ilmu psikologi, dimana dalam Studi Hubungan Internasional telah digunakan oleh banyak penelitian yang berfokus pada analisis kebijakan luar negeri.

Dalam pendekatan idiosinkratik, Hermann menekankan bahwa kepribadian seorang pemimpin memiliki peran sebagai penyaring kognitif dalam proses pembentukan keputusan luar negeri. Selain itu, Hermann berpendapat bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan hasil keputusan seorang individu. Sehingga personal pemimpin memiliki peran penting dalam mengidentifikasi ancaman, menafsirkan informasi, serta menentukan arah kebijakan luar negeri suatu

negara. Oleh karena itu, individu memiliki peran yang semakin kuat dalam mempengaruhi arah kebijakan luar negeri terlebih lagi didorong oleh kekuasaan yang kuat, keterkaitan yang tinggi terhadap isu internasional, serta menghadapi situasi krisis dan ambigu. Oleh karena itu, Hermann berpendapat bahwa untuk memahami setiap proses pengambilan suatu kebijakan luar negeri penting dilakukan analisis terhadap karakteristik dan kepribadian seorang individu, dimana pada dasarnya hal tersebut akan dapat menentukan orientasi pada setiap kepemimpinan (Hermann et al., 2001).

Dalam jurnal *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders* (1980), Hermann menunjukkan kerangka yang dapat diterapkan dalam menganalisis pola perilaku dan orientasi seorang pemimpin. Dalam penelitian tersebut, Hermann menunjukkan enam karakteristik seorang individu (pemimpin) yang dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara yakni *nationalism* (nasionalisme), keyakinan diri dalam mengendalikan suatu peristiwa (*belief in ability to control events*), (*need of power*) kebutuhan akan kekuasaan, *conceptual complexity* (kompleksitas konseptual), *excessive suspiciousness or distrust of others* (ketidakpercayaan terhadap pihak lain), serta *need for affiliation* (kebutuhan akan afiliasi). Kemudian, karakteristik tersebut dikelompokkan kembali ke dalam empat kategori karakteristik, yakni *beliefs* (keyakinan), *motives* (motif), *interpersonal style* (gaya interpersonal), serta *decision style* (gaya pengambilan keputusan). Empat kategori tersebut secara kolektif nantinya akan menentukan orientasi seorang pemimpin dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara (Hermann, 1980).

Kategori pertama, *beliefs* (keyakinan), yang mengacu pada pandangan fundamental seorang pemimpin mengenai dunia politik dan persepsi terhadap kemampuan dirinya dalam kondisi tersebut. Terdapat 2 karakteristik yang dapat dianalisis dalam kategori ini adalah *nasionalism* (nasionalisme) dalam hal ini tingkat identifikasi emosional aktor terhadap bangsa. Serta *belief in ability to take control events* (kepercayaan akan kemampuan dalam mengendalikan peristiwa). Kategori keyakinan merupakan suatu hal yang krusial karena akan menentukan apakah pemimpin tersebut memandang dunia sebagai lingkungan yang penuh kendala yang tidak dapat diubah ataupun sebagai tempat yang bisa dipengaruhi (Hermann, 1980).

Lebih lanjut, kategori kedua *motives* (motif), menjelaskan dorongan atau alasan dasar dibalik setiap tindakan atau keputusan dari seorang pemimpin dalam politik luar negeri. Herman, memfokuskan kategori ini pada tiga aspek karakteristik, yakni *need affiliation* (kebutuhan akan afiliasi) dan *need for power* (kebutuhan akan kekuasaan). Motivasi memiliki peran penting sebagai faktor penentu arah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan, apakah seorang pemimpin akan cenderung mengutamakan dominasi dan perluasan pengaruh atau justru memilih menjaga hubungan dan kerja sama dengan aktor lain (Hermann, 1980).

Kemudian, kategori ketiga, *decision making style* (gaya pengambilan keputusan), yang berfokus pada bagaimana suatu keputusan yang sering diambil oleh seorang pemimpin. Karakteristik utama untuk dianalisis dalam kategori ini adalah *conceptual complexity* (kompleksitas konseptual), untuk mengukur sejauh mana seorang pemimpin dalam membedakan berbagai aspek dan perspektif

mengenai suatu isu. Seorang pemimpin yang memiliki kompleksitas yang lemah cenderung memandang isu secara hitam-putih dan kerap sekali bergantung pada intuisi atau keyakinan pribadi. Sementara itu, pemimpin yang memiliki kompleksitas yang kuat akan lebih terbuka terhadap berbagai informasi (Hermann, 1980).

Terakhir, kategori ke empat *Interpersonal style* (gaya interpersonal), yang menggambarkan bagaimana seorang pemimpin dapat berinteraksi dan menjalin hubungan dengan pihak lain, terutama aktor internasional. Dalam kategori ini, Herman berfokus pada satu karakteristik, yakni *distrust of others* (kuat atau lemahnya kecurigaan terhadap pihak lain). Pemimpin yang memiliki tingkat kecurigaan yang kuat dalam gaya interpersonal kerap sekali menghasilkan kebijakan luar negeri yang cukup ketat, skeptis, dan akan cenderung mengambil keputusan sepihak. Sementara itu, pemimpin yang memiliki tingkat kecurigaan yang lemah terhadap pihak lain akan mengambil kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan berorientasi pada partisipasi (Hermann, 1980).

Hasil identifikasi enam karakteristik diatas, kemudian akan menjadi acuan dalam menjelaskan dan memahami bagaimana gaya kepemimpinan seorang aktor politik pada panggung internasional. Selain itu, Hermann membagi orientasi gaya kepemimpinan tersebut menjadi enam, tetapi dalam konteks penelitian ini, penulis hanya akan disampaikan dua yang dinilai paling mencerminkan Trump, yakni gaya kepemimpinan independen dan gaya partisipatif. Gaya kepemimpinan independen ditandai dengan sikap nasionalisme yang cenderung tinggi, memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang kuat, serta cenderung menempatkan kecurigaan terhadap

aktor lain. Selain itu, pemimpin yang independen cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang kuat dan diiringi oleh tingkat kompleksitas yang cenderung lemah. Dalam hal ini, orientasi kebijakan luar negeri pemimpin yang independen cenderung tertutup dengan pengaruh pihak luar, skeptis, memperlihatkan nilai individualisme, serta transaksional.

Selain independen, Hermann juga menyampaikan gaya kepemimpinan partisipator, yang tercermin dari pemimpin yang cenderung menunjukkan kepercayaan diri moderat, kompleksitas konseptual yang kuat. Kemudian, pemimpin tersebut akan memiliki tingkat kecurigaan yang lemah terhadap aktor lain, dan memiliki kebutuhan akan afiliasi yang kuat. Dalam hal ini, pemimpin dengan gaya partisipator akan lebih terbuka dengan kerja sama dan menilai bahwa multikulturalisme adalah alat dalam mencapai tujuan bersama (1999)

1.6 Operasional Konseptual

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Level of Analysis Idiosinkratik

Penelitian ini menggunakan pendekatan idiosinkratik dengan berfokus pada level analisis individu, yang berpendapat bahwa gaya kepemimpinan, karakteristik, serta persepsi dari seorang pemimpin memiliki peran penting dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri (Hermann, 1980). Selain itu, pendekatan ini berlandaskan pada argumen mengenai aktor politik yang bertindak hanya berdasarkan rasionalitas negara semata, tetapi juga dipengaruhi oleh psikologi dalam dirinya. Di lain sisi, James Coulombis dan Wolfe mendefinisikan idiosinkratik sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan

karakteristik, citra, dan persepsi pribadi individu pembuat keputusan tersebut (Saputra, 2018). Dengan demikian, perbedaan pada kebijakan luar negeri dapat dipahami melalui perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap pemimpin negara, meskipun dalam menghadapi isu internasional yang relatif sama.

Dalam menganalisis kepribadian seorang pemimpin, penelitian ini merujuk pada pemikiran Margaret Hermann, melalui teknik *Leadership Trait Analysis* (LTA). Teknik ini berlandaskan pada sistem pengelompokan sifat-sifat kepribadian tertentu dan menentukan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Teknik ini menggunakan analisis konten terhadap pernyataan pidato, wawancara, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin karena pada umumnya hal tersebut mengandalkan spontanitas. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah penulis yang ingin melakukan analisis kepribadian pemimpin, akan tetapi tidak memungkinkan adanya kontak langsung dengan pemimpin tersebut (Herman, 1999). Terdapat tujuh karakteristik personal yang nanti akan dikelompokkan ke dalam empat kategori yang berperan sebagai filter bagi pemimpin dalam menerima dan mengambil kebijakan luar negeri.

Kategori pertama mencakup keyakinan, yang mencerminkan asumsi dasar pemimpin mengenai dunia dan kemampuan dalam mengendalikan situasi. Indikator ini akan di nilai dari dua karakteristik, yakni nasionalisme untuk menilai sejauh mana seorang pemimpin dalam menentukan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dan saling terikat kuat dengan identitas negara sendiri. Serta, kepercayaan dalam mengontrol suatu peristiwa untuk mengukur sejauh mana pemimpin percaya dalam memberikan pengaruh terhadap isu internasional. Pemimpin yang

menunjukkan kecenderungan yang tinggi akan lebih cenderung aktif dan menantang serta akan cenderung menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan global.

Kemudian, kategori kedua motif, yang berperan menjelaskan alasan fundamental yang menggerakkan pemimpin untuk mengambil suatu tindakan. Kategori ini akan berfokus pada kebutuhan afiliasi dan kebutuhan kekuasaan. Penilaian terhadap karakteristik ini dilakukan untuk memahami apakah seorang pemimpin mengambil tindakan tersebut karena ada dorong untuk memiliki kontrol pengaruh dan dominasi yang kuat terhadap orang lain atau justru memilih untuk lebih menjaga hubungan dengan aktor lain.

Selanjutnya, kategori ketiga gaya pengambilan keputusan, dimana pola ini menunjukkan keadaan pribadi seorang pemimpin dalam mengelolah suatu informasi sebelum menentukan keputusan atau pilihan tertentu. Herman menyebutkan bahwa penilaian dilakukan melalui analisis terhadap dua karakteristik, yakni kompleksitas konseptual. Karakteristik tersebut digunakan untuk memahami kemampuan seorang pemimpin dalam memproses informasi yang masuk. Serta, sejauh mana pemimpin akan lebih mengandalkan penilaian sendiri dibandingkan masukan baik dari penasehat maupun birokrasi dalam menentukan suatu kebijakan luar negeri. Kemudian, pemimpin dengan tingkat kompleksitas konseptual yang rendah akan menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan cenderung melihat suatu konflik hitam-putih dan lebih mengandalkan naluri sendiri.

Kategori terakhir adalah gaya interpersonal, yang berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana seorang aktor dalam berinteraksi dengan aktor

lain serta bagaimana memposisikan negaranya terhadap pihak lain. Herman berfokus pada satu karakteristik dalam menilai kategori ini, yakni kecurigaan terhadap aktor lain. Hal tersebut dilakukan karena tingkat kepercayaan terhadap pihak lain akan memiliki peran penting dalam menentukan perilaku atau keputusan dari seorang pemimpin. Pemimpin dengan tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap aktor lain akan lebih cenderung menghasilkan kebijakan luar negeri yang cukup ketat, skeptis, serta mengambil keputusan yang sepihak.

1.6.1.2 Kebijakan Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat

Sistem kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan suatu proses pembentukan putusan yang bersifat sistemik, dimana hasil interaksi antara dinamika politik domestik dengan otoritas institusional menjadi landasan putusan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua aspek yang akan menjadi fokus untuk membentuk standar operasional dalam sistem kebijakan luar negeri AS. Dalam hal ini, kedua aspek tersebut akan menjelaskan terkait dorongan dari berbagai pihak terhadap putusan kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina (Farivar, 2024).

Kewenangan insitusional dan mekanisme *checks and balance*, pada sistem pemerintahan Amerika Serikat, kebijakan luar negeri merupakan suatu wilayah *shared power* (kekuasaan bersama) antara legislatif dan eksekutif. Meskipun Presiden memiliki wewenang sebagai *Commander in Chief* (panglima tertinggi), tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh peran kongres sebagai institusi negara yang setara. Wewenang paling vital yang dimiliki oleh parlemen adalah *Power of the*

Purse (kuasa anggaran), yakni bantuan luar negeri tidak dapat disalurkan apabila tidak adanya alokasi dana dari kongres. Di sisi lain, kongres juga memiliki wewenang dalam melakukan *oversight* (pengawasan) yang mengizinkannya untuk evaluasi setiap kebijakan. Wewenang tersebut menunjukkan bahwa secara konstitusional, parlemen memiliki hak secara mutlak untuk terlibat langsung dalam pembentukan bantuan internasional. Dengan demikian seorang presiden tidak dapat bertindak secara unilateral dalam menggunakan anggaran negara, terutama terhadap penyaluran bantuan internasional (European Parliament EPRS, 2017).

Kemudian, dinamika politik, dalam sistem pemerintahan, kebijakan luar negeri AS juga kerap sekali dipengaruhi oleh variabel domestik yang dinamis. Dinamika di luar pemerintahan, seperti opini publik dan kelompok kepentingan berperan dalam memberikan tekanan terhadap suatu kebijakan luar negeri. Namun, opini publik menjadi determinan utama yang akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintah. Meskipun dalam pola sistem kebijakan luar negeri terdapat aktor lain seperti media massa dan kelompok kepentingan, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana aspirasi masyarakat dan dukungan publik membentuk arah yang seharusnya memiliki pengaruh bagi eksekutif dan legislatif (sebagai perwakilan masyarakat) dalam memutuskan kebijakan luar negeri (Farivar, 2024).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Idiosinkratik

Pada penelitian ini, level analisis idiosinkratik secara operasional didefinisikan sebagai karakteristik atau kepribadian Donald Trump yang

membedakannya dari aktor lain. Serta, memiliki peran pada perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama pembatasan hingga penahanan bantuan terhadap Ukraina. Kemudian, karakteristik Donald Trump akan dioperasionalkan melalui keempat kategori tersebut.

Kategori pertama, keyakinan, dalam hal ini karakteristik nasionalisme akan dioperasionalkan sebagai konsistensi pernyataan Trump yang menunjukan kepentingan AS sebagai prioritas yang tidak dapat dibandingkan dengan bantuan terhadap Ukraina. Kemudian, kepercayaan akan kemampuan mengendalikan suatu peristiwa akan dioperasionalkan pada kecenderungan Trump dalam menempatkan diri sebagai aktor dengan kapasitas yang besar untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya tercermin pada tahun 2023, Trump secara langsung menyampaikan bahwa dirinya mampu menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina hanya dalam waktu 24 jam (CNN Indonesia, 2023).

Kemudian, dalam kategori motif, karakteristik kebutuhan akan kekuasaan akan dioperasionalkan sebagai tendensi Trump dalam mempertahankan dan memperluas kendali personalnya atas keputusan mengenai Ukraina. Meskipun ketika dominasi tersebut harus berhadapan dengan mandat institusional yang telah ditetapkan. Sementara itu, karakteristik kebutuhan akan afiliasi dioperasionalkan melalui rendahnya tingkat pertimbangan Trump mengenai dampak kebijakan terhadap hubungan bilateral AS-Ukraina, serta mitra lain.

Lebih lanjut, karakteristik dalam kategori gaya kepemimpinan, yakni kompleksitas konseptual akan dioperasionalkan pada tingkat pemahaman dan pertimbangan multidimensi Trump mengenai konflik Rusia-Ukraina. Redahnya

tingkat pemahaman Trump terkait konflik, maka kebijakan akan berpotensi menyesuaikan penyederhanaan tersebut. Selain itu, dengan kompleksitas yang lemah, Trump akan cenderung mengambil keputusan secara sepihak. Sedangkan kategori terakhir, gaya interpersonal dengan karakteristik ketidakpercayaan terhadap pihak lain akan dioperasionalkan pada tingkat kecenderungan Trump dalam menilai mitra lain, seperti pemerintah Ukraina dan Zelensky.

1.6.2.2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat didefinisikan sebagai proses terbentuknya kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina. Analisis tersebut akan menunjukkan apakah kebijakan bantuan terhadap Ukraina berjalan sesuai dengan mekanisme konstitusional dan kepentingan nasional yang sudah disahkan secara institusional, atau justru tidak sejalan. Operasional konsep ini akan dibagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

Kewenangan institusional dan mekanisme *checks and balance*, dalam Operasional aspek ini akan merujuk pada struktur konstitusional Amerika Serikat yang membagi kekuasaan antara presiden sebagai pemegang eksekutif dan kongres selaku lembaga legislatif dalam memutuskan kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina. Kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina yang awalnya telah mendapatkan legitimasi formal melalui persetujuan kongres. Salah satu contohnya adalah penyaluran bantuan pada tahun 2019 sebanyak \$391 juta yang sebelumnya sudah disetujui oleh kongres AS. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan telah disetujui legislatif (kongres), maka kebijakan tersebut akan

dipandang sebagai kebijakan resmi negara yang memiliki dasar hukum institusional (U.S. House of Representatives, n.d.).

Sedangkan, operasional mekanisme *checks and balance* akan diukur melalui pergeseran kebijakan yang dikeluarkan Trump terhadap penyaluran bantuan Ukraina dengan mandat kebijakan yang sebelumnya telah disetujui oleh kongres. Pergeseran tersebut akan dianalisis melalui apakah tindakan penundaan hingga pembatasan bantuan yang dilakukan Trump berlandaskan oleh keamanan nasional yang sah, administratif, dan strategis. Selain itu, analisis akan berfokus pada kemungkinan adanya pengaruh kepentingan personal maupun politik, terutama dengan munculnya asumsi tekanan politik untuk kepentingan pribadi Trump. Serta, repson kongres, mulai dari investigasi, pemanggilan saksi, hingga proses *impeachment* (pemakzulan) terhadap tindakan Trump yang melakukan penundaan dan pembatasan bantuan terhadap Ukraina.

Selanjutnya, dinamika politik domestik, dalam operasional konsep, kategori ini akan berfokus pada opini publik AS sebagai representasi dari dukungan domestik terhadap isu keberlanjutan bantuan luar negeri terhadap Ukraina. Opini publik digunakan sebagai alat dalam menilai apakah keberlanjutan bantuan terhadap Ukraina memiliki dukungan domestik yang cukup kuat, sehingga dapat menjadi dasar analisis tindakan Trump ketika terjadi penundaan dan penghentian penyaluran bantuan. Dukungan maupun penolakan masyarakat Amerika Serikat terhadap keberlanjutan bantuan akan diukur melalui data survei nasional dari lembaga independen dan kredibel. Apabila data menunjukkan dukungan publik yang relatif mendukung keberlanjutan bantuan kepada Ukraina, tetapi Trump tetap menunda

bahkan membatasi bantuan. Keputusan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari dorongan publik, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kepribadian Trump. Secara keseluruhan, opini publik adalah alat analisis sejauh mana kebijakan penundaan dan penghentian bantuan terhadap Ukraina mencerminkan masyarakat Amerika Serikat.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pergeseran kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika partai, perkembangan konflik, tuntunan institusional, tetapi juga dapat melibatkan persepsi atau karakteristik personal Donald Trump. Oleh karena itu, untuk memahami pergeseran yang terjadi penting dilakukan pertimbangan pada semua aspek yang tersebut. Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa penjelasan melalui dinamika partai, dinamika internasional tidak cukup untuk menganalisis pergeseran yang terjadi. Terlebih lagi, pergeseran tersebut terjadi ditengah kondisi institusional dan domestik menunjukkan arah yang berbeda, dimana mereka relatif mendukung keberlanjutan bantuan terhadap Ukraina. kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergeseran yang terjadi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tuntutan dari partai, domestik, internasional, maupun institusional.

Ketidaktuntasan analisis pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina dari aspek institusional, partai, domestik, hingga internasional tersebut membuka ruang baru untuk menganalisis pergeseran, yakni level individu.

Dalam analisis level individu, persepsi atau karakteristik personal memiliki peran penting dalam memahami suatu peristiwa dan mengambil keputusan yang dinilai tepat. Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa karakteristik Trump menjadi faktor yang berkontribusi pada perubahan arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina. Dalam konteks ini, karakteristik yang mencakup keyakinan, motif, gaya interpersonal dan gaya pengambilan keputusan membentuk pola kepemimpinan Trump yang lebih cenderung memandang bantuan terhadap Ukraina sebagai alat yang dapat dihentikan, diubah, atau bahkan digunakan berlandaskan pertimbangan personal.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan teknik dalam menganalisis suatu peristiwa dengan menggunakan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis, serta mengambil kesimpulan secara objektif dan sistematis. Hal tersebut, dilakukan sebagai upaya memecahkan rumusan masalah atau menguji hipotesis dan memperoleh suatu pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021). Dalam konteks menganalisis penyebab dari terjadinya pergeseran arah kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinan Trump (1.0 dan 2.0), penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell, metode kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami secara keseluruhan mengenai makna dari suatu fenomena sosial yang sedang dihadapi (Creswell, 2009). Penulis akan berfokus pada pemahaman makna,

persepsi, hingga proses aktor yang terlibat dalam keputusan kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis eksplanatif. Menurut Kolter (2006), penelitian eksplanasi merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai sebab-akibat dari suatu fenomena, melalui analisis dokumen, partisipasi, hingga wawancara (Pujiati, 2024). Dalam konteks penelitian, analisis eksplanasi digunakan dalam menjelaskan faktor yang berkaitan dengan pergeseran arah kebijakan bantuan luar negeri AS terhadap Ukraina selama kepemimpinan Trump, baik penundaan sementara pada 2019 hingga penghentian sementara tahun 2025 (Pujiati, 2024).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini akan dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai obyek penelitian (Pujiati, 2024). Namun, dalam penelitian kualitatif, situs penelitian tidak selalu merujuk pada tempat secara fisik, tetapi juga dapat mencakup sumber informasi, lingkungan, hingga institusi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat non-lapangan serta merujuk pada sumber online dan institusional. Penulis mengumpulkan informasi melalui arsip pidato, laporan media, wawancara resmi, dokumen kebijakan luar negeri (Amerika Serikat), hingga publikasi dari berbagai lembaga yang kredibel.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian subjek memiliki peran penting karena terdapat data variabel yang akan diamati dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2016), subjek penelitian mencakup benda, hal, proses, atau orang yang menjadi sumber data atas variabel yang dikaji dan menjadi fokus fenomena dalam penelitian (Salmaa, 2023). Subjek dalam penelitian ini adalah Donald Trump sebagai individu dan aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Ukraina. Penelitian ini berfokus pada karakteristik kepribadian Trump yang dipahami menggunakan pendekatan idiosinkratik.

1.8.4 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, dan dokumentasi (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini, data yang digunakan mencakup pidato resmi, wawancara, unggahan media sosial milik Trump, serta artikel berita dan jurnal yang relevan.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data dan informasi didapatkan, yang kemudian dibagi menjadi dua garis besar, yakni primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, sedangkan sekunder adalah data yang dikumpulkan sebagai penunjang

dari sumber pertama (Pujiati, 2024). Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan kedua sumber data tersebut, dimana sumber primer akan mencakup transkrips wawancara dan pidato, serta pernyataan resmi dari Gedung Putih. Sementara data sekunder, akan dikumpulkan dari publikasi ilmiah, seperti jurnal artikel, sumber artikel berita yang kredibel dan relevan dengan fenomena penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel media kredibel, jurnal ilmiah, laporan, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Donald Trump dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui studi pustaka, penelitian ini dapat membangun kerangka teoritis, mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya, serta mengumpulkan informasi yang berkaitan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini akan menggunakan konten analisis-kualitatif. Menurut Stone, et al (1966) konten analisis adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu karakteristik, tema, makna, atau kategori tertentu yang terdapat dalam teks secara sistematis dan objektif (Macnamara, n.d.). Kemudian, kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk menekankan pada makna dan konteks dari pernyataan tersebut, tidak pada penghitungan *code* atau skor. Dalam penelitian

ini, konten analisis akan digunakan dengan pendekatan yang baku, yakni kategori atau kriteria yang telah ditetapkan dalam kerangka *Leadership Trait Analysis* (LTA) Hermann tahun 1980. Kriteria tersebut yang kemudian dicocokkan dengan data, yakni pernyataan Donald Trump, baik dari wawancara, pidato, debat, maupun unggahan di akun pribadinya terkait konflik Rusia-Ukraina, yang kemudian akan menandai frasa tersebut dengan cara dicetak tebal. Selanjutnya, penulis akan menginterpretasikan makna dari frasa tersebut, serta merangkumnya untuk menyimpulkan kecenderungan karakteristik Donald Trump.

1.8.8 Kualitas Data

Untuk memastikan kualitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang bersumber dari sumber yang kredibel dan valid. Data diperoleh dari studi pustaka, mencakup transkrip wawancara resmi, pidato, dokumen, laporan dan dokumen resmi, serta media terpercaya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama selama kepemimpinan Donald Trump. Kemudian, data tersebut akan dianalisis menggunakan kerangka idiosinkratik yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann yang berfokus pada karakteristik dan gaya kepemimpinan dalam memandang sistem internasional. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggambarkan kepribadian Trump sebagai faktor internal, tapi juga akan menganalisis bagaimana lingkungan sosial berperan dalam membentuk dan memperkuat orientasi politik dan dominasi pribadinya dalam kebijakan luar negeri, terutama pembatasan bantuan terhadap Ukraina.